



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Anisa Nur Afifah¹, Fanan Fauzi Arif², Anis Tasya Usolichah³, Dian Wahyu Nur'Aini⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email:

¹anisanurafifah2506@gmail.com,

²fananfauzi2001@gmail.com,

³annstaa30@gmail.com,

⁴dianwahyuu175@gmail.com

Abstract

The waste problem is a crucial and never-ending issue. This phenomenon is often caused by the consumerist nature of society and ineffective waste management. This study examines how Banyumas Regency can escape the waste emergency through the implementation of waste management policies at the Kedungrandu Integrated Waste Management Site (TPST). The purpose of this study is to analyze the implementation process of waste management policies at the Kedungrandu TPST, Patikraja District. The method used in this study is a qualitative descriptive case study approach, through observation, interviews, and documentation with informants determined using a purposive model. This study shows that the results of waste management carried out by the Kedungrandu TPST are good. This is evidenced by the success of the Kedungrandu TPST in processing 15 tons of waste per day. The processed products will later be turned into products that have sales value such as compost, plastic roof tiles, and plastic paving blocks. Its success in managing and processing waste makes the Kedungrandu TPST the best waste processing site in Southeast Asia and is used as an example for other regions in managing waste in their regions.

Keywords: Implementation; Waste Management Policy; TPST.

Abstrak

Permasalahan sampah merupakan masalah yang krusial dan tiada habisnya. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh sifat konsumtif masyarakat dan pengelolaan sampah yang masih belum efektif. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara Kabupaten Banyumas dapat terlepas dari darurat sampah melalui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu Kecamatan Patikraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus

deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan model *purposive*. Penelitian ini menunjukkan hasil pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPST Kedungrandu sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil TPST Kedungrandu dalam mengolah sampah sebanyak 15 ton per harinya. Hasil olahan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai produk yang memiliki nilai jual seperti pupuk kompos, genteng plastik dan paving block plastik. Keberhasilannya dalam mengelola dan mengolah sampah menjadikan TPST Kedungrandu sebagai tempat pengolahan sampah terbaik se-Asia Tenggara dan dijadikan contoh oleh daerah lain dalam mengelola sampah di wilayahnya.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Pengelolaan Sampah; TPST.

1. Pendahuluan

Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang sangat mengganggu dan menjadi tantangan di Indonesia. Permasalahan ini merupakan fenomena alami yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah. Namun, sekarang masalah lingkungan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena sebagai manusia kita berperan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan lingkungan. Dibandingkan dengan faktor alam, permasalahan lingkungan yang timbul akibat ulah dan aktivitas manusia jauh lebih besar. Kerusakan alam dan lingkungan yang terus menerus dan berlanjut menunjukkan bahwa belum terdapat solusi yang tepat untuk mengatasinya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 282,48 juta jiwa (Fadlurrahman, 2024), permasalahan yang ada di Indonesia cukup kompleks. Salah satunya adalah permasalahan sampah yang masih menjadi topik utama di berbagai daerah di Indonesia.

Hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan dalam mengelola sampah. (Hastuti et al., 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai hasil buangan dari sisa aktivitas manusia dan proses alam. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia membuat Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam produksi sampah. Dilansir dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sampah yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2023 sudah mencapai lebih dari 19 ton. Sementara itu, tahun 2022 mencatat akumulasi sampah tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan total mencapai 37,6 juta ton. Berikut peneliti sajikan tabel timbulan sampah nasional pada tahun 2019 - 2023.

Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah di Indonesia	
Tahun	Jumlah Sampah (Ton/ Tahun)
2019	27.618.401
2020	27.597.066
2021	28.459.222
2022	37.667.251
2023	19.321.897

Sumber : SIPSN

Berdasarkan data tabel 1. menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan masih tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Meskipun

demikian, pengelolaan sampah masih belum optimal, terutama di daerah kota- kota besar dengan jumlah penduduknya yang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah supaya masalah sampah ini dapat teratasi (Fitri et al., 2019).

Masih tingginya angka volume sampah di tiap tahunnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di berbagai daerah masih mengalami hambatan dan belum berjalan optimal. Salah satu daerah yang masih menghasilkan sampah terbanyak yaitu Jawa Tengah. Melansir dari SIPSN (2023) diketahui bahwa sampah yang dihasilkan Jawa Tengah mencapai 3,62 juta ton sampah yang membuat Jawa Tengah menempati posisi ke-2 sebagai daerah penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Dengan luas wilayah yang cukup besar, yaitu 34.334 km persegi dengan jumlah penduduk yang mencapai 38,28 juta jiwa pada Juni 2024 (Fadlurrahman, 2024), membuat produksi sampah pun meningkat secara signifikan dan menambah tantangan dalam pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu daerah yang telah lama menghadapi permasalahan sampah, bahkan sempat mengalami darurat sampah yaitu Kabupaten Banyumas (Utami, 2024).

Kabupaten Banyumas yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah 132.78 Ha, dengan 27 Kecamatan, 301 desa dan 30 Kelurahan, serta 1.898.746 jiwa penduduk. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut, membuat volume sampah yang dihasilkan pun cukup tinggi. Berdasarkan data timbulan sampah tahun 2023, Kabupaten Banyumas menghasilkan sampah sebanyak 522.937 kg sampah per harinya. Jumlah tersebut dihasilkan dari 624.523 KK, kemudian sampah di luar sampah rumah tangga mencapai 10-15 ton (BRIN, 2024).

Kabupaten Banyumas sempat mengalami darurat sampah dan permasalahan utamanya yaitu terjadi karena banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini terjadi karena belum adanya penanganan sampah secara berkelanjutan oleh pemerintah sehingga menyebabkan bau tak sedap. Hal ini menimbulkan protes yang dilakukan oleh warga dengan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Gunung Tugel karena sudah tidak lagi mampu menampung sampah yang melebihi kapasitas. Keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan sampah, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah semakin memperburuk situasi karena masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Banyumas membuat pola pengelolaan sampah yang baru. Teknik pengelolaan sampah yang digunakan yaitu dengan teknik hulu ke hilir. Teknik ini dilakukan dengan cara mengolah sampah dari sumbernya yaitu rumah, jadi masyarakat wajib untuk memilah sampahnya sendiri sebelum nantinya diangkut oleh petugas. Pemerintah juga menyiapkan aplikasi berbasis informasi teknologi berupa SALINMAS dan JEKONYONG, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, nantinya masyarakat yang mau memilah sampahnya sendiri akan diberi *reward* berupa uang tunai (BRIN, 2024).

Kabupaten Banyumas memiliki strategi terkait kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Bupati No 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Pengelolaan sistem hanggar atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) merupakan cara baru Pemerintah Banyumas dalam mengatasi sampah. Melalui pola pengelolaan sampah yang baru ini permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat.

Diberlakukannya kebijakan pengelolaan sampah yang baru membuat Pemerintah Banyumas mengubah pola sistem pengelolaan sampah yang lebih berfokus pada pemilahan dan pengolahan sampah. Oleh karena itu, untuk mendukung pola tersebut pemerintah mulai mengembangkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagai upaya peningkatan efektivitas dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah, sekaligus menggantikan pola sebelumnya yang hanya mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai tempat penampungan sampah.

Berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebelumnya, sampah hanya dibiarkan menumpuk tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Sedangkan melalui sistem Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), sampah akan dipilah dan diolah menjadi barang yang bernilai jual seperti, pakan magot, genteng plastik dan *paving block*. Dengan demikian pengelolaan sampah melalui sistem ini tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah ini pemerintah telah membangun dan membagi sejumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas. Berikut peneliti sajikan jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang ada di Banyumas.

Tabel 2. Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Banyumas.

No	Wilayah	2022	2023
1.	Banyumas	1	1
2.	Patikraja	1	2
3.	Pekuncen	1	1
4.	Rawalo	1	1
5.	Sokaraja	1	1
6.	Sumbang	1	1
7.	Sumpiuh	1	1
8.	Wangon	1	1
9.	Ajibarang	1	1
10.	Baturaden	1	1
11.	Cilongok	1	1

Sumber : Data & Informasi Banyumas Satria

Dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah melalui hanggar atau TPST kini Kabupaten Banyumas berhasil mengatasi darurat sampah yang tadinya menghasilkan sampah 600 ton/hari, saat ini sudah mampu mengelola 80% sampah yang berhasil diolah. Berikut peneliti sajikan data sampah yang sudah terkelola di Kabupaten Banyumas.

Tabel 3. Data Sampah Terkelola pada tahun 2023

No	Jenis Data	Satuan	2023
1.	Jumlah Timbunan Sampah	Ton	197.758,42
2.	Jumlah Sampah Terkelola	Ton	196.396,58
3.	Jumlah Sampah Tidak Terkelola	Ton	1.361,84
4.	Persentase Sampah Terkelola	Persen	99,31
5.	Persentase Sampah Tidak Terkelola	Persen	0,69

Sumber : Data & Informasi Banyumas Satria

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau TPST merupakan tempat yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan sampah, mulai dari mengumpulkan, memilah, mengolah, hingga mendaur ulang sampah yang nantinya akan dijadikan sebagai barang yang memiliki nilai jual. Salah satu TPST yang menarik untuk diteliti yaitu TPST Kedungrandu. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu terletak di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. TPST Kedungrandu merupakan TPST pertama yang menjadi permulaan pengelolaan sampah di Banyumas. Sistem pengelolaan yang diterapkan pada TPST ini meliputi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. TPST Kedungrandu dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM yang setiap harinya mengolah sampah masuk sebanyak 21.037 ton/hari. TPST Kedungrandu menerima sampah dari 3100 pelanggan yang terdiri dari 3067 KK sampah rumah tangga dan 33 sampah non-rumah tangga. Dalam proses pengelolaan sampah ini TPST Kedungrandu dikatakan sebagai salah satu TPST dengan pengelolaan sampah yang baik. Dikatakan baik karena dalam mengolah sampah TPST Kedungrandu sudah didukung dengan peralatan yang canggih seperti mesin pemilah sampah yang otomatis akan memilah antara sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik yang sudah dipilah nantinya akan dijadikan sebagai produk berupa paving blok, genteng dan juga bijih plastik. Sedangkan sampah organik dijadikan sebagai pakan untuk budidaya magot yang nantinya akan diperjual belikan. Berkat keberhasilannya dalam mengelola sampah, membuat Kabupaten Banyumas dinobatkan sebagai pengelolaan sampah terbaik se-Asia Tenggara pada tahun 2023 (Sari, 2024).1].

Beberapa penelitian terdahulu juga telah membahas permasalahan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti et al., 2021), dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Bengkulu Selatan"* menunjukkan fakta bahwa kurangnya biaya anggaran, sarana dan prasarana, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pengelolaan sampah di Bengkulu Selatan juga dikatakan belum sesuai dan terealisasi secara maksimal, karena masih adanya petugas yang bekerja diluar dari tupoksi dan tidak sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP). Sedangkan penelitian dengan judul *"Implementasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora"* yang dilakukan oleh (Yudianto et al., 2021) menunjukkan bahwa adanya dukungan regulasi yang kuat, keterlibatan aktif Dinas Lingkungan Hidup dan juga sistem pengelolaan sampah yang sistematis dan berkesinambungan menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, keterlibatan masyarakat serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi faktor kunci dalam terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah yang optimal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Nurlina et al., 2021) dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)"*, menyebutkan bahwa dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya koordinasi antar pelaksana serta kurangnya komunikasi secara efektif menjadikan implementasi pengelolaan sampah di wilayah ini kurang maksimal. Namun, komitmen pemerintah daerah sangat kuat dengan mengadakan sosialisasi dan juga penambahan armada yang membantu kelancaran implementasi kebijakan ini. Dengan ini, untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian di atas berfokus pada identifikasi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah seperti keterbatasan sumberdaya, kurangnya sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar pihak pelaksana. Penelitian ini menyajikan fokus analisis yang berbeda, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kendala - kendala yang menghambat proses

implementasi, tetapi juga mengungkap faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan di TPST Kedungrandu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa aspek sumber daya sebagai hambatan dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah, seperti kurangnya tenaga kerja, anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam penelitian ini justru aspek sumber daya menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu. Adanya tenaga kerja yang cukup dan terlatih, peralatan pengelolaan sampah yang lengkap dan canggih, serta adanya pendanaan mandiri yang terus berjalan membuat sistem pengelolaan sampah berlangsung dengan lancar. Temuan ini menandakan bahwa sumber daya tidak selalu menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah, tetapi juga dapat menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Tinjauan Pustaka

a. Implementasi Kebijakan

Guna menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, dan politik, pemerintah memanfaatkan langkah yang strategis dengan menggunakan implementasi kebijakan publik. Implementasi ini berkaitan dengan pelaksanaan keputusan – keputusan kebijakan dasar, berupa undang – undang, petunjuk pelaksanaan, maupun perintah dari eksekutif (Maharaksa et al., 2025). Menurut KBBI Implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Secara umum implementasi yaitu proses pelaksanaan sebuah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah kebijakan dikatakan sudah baik jika manfaat dan tujuan sebuah kebijakan sudah tercapai. Terwujudnya manfaat dan sasaran kebijakan sebagaimana sudah direncanakan menandakan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Grindle (Kasmad, 2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk mempermudah pencapaian hasil agar berdampak nyata terhadap kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tugas implementasi kebijakan juga mencakup sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan.

Menurut Winarno (2016:145) dalam (Sufi et al., 2022) implementasi kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Van Meter Van Horn yang menegaskan langkah yang dilakukan untuk mencapai sebuah kebijakan merupakan arti dari implementasi kebijakan. Sedangkan George Edward III mengatakan kurangnya perhatian terhadap implementasi sebagai masalah utama dalam administrasi publik (Kasmad, 2018). Ia berpendapat bahwa faktor faktor di luar dari isi kebijakan juga menjadi kunci kesuksesan implementasi kebijakan.

b. Pengelolaan sampah

Sampah merupakan isu penting yang berkaitan dengan lingkungan. Bertambahnya populasi manusia setiap tahunnya, menyebabkan volume sampah kian meningkat. Jika sampah tidak dikelola dengan tepat maka akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Permasalahan sampah ini juga tak lepas dari pengaruh sikap konsumtif masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan (Kurniawan & Santoso, 2021). Berdasarkan Undang – Undang ini sampah dikategorikan menjadi

dua jenis, yaitu sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Undang – Undang ini juga menjelaskan terkait pengelolaan sampah yang dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengurangan dan penanganan, mulai dari pemilahan hingga pemrosesan akhir. Kemudian untuk sampah berbahaya dan beracun pengelolaannya harus dilakukan secara khusus (RI, 2023).

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Peneliti merencanakan, melakukan, menganalisis, dan melaporkan temuan penelitian melalui proses penelitian yang dilengkapi dengan pertanyaan tertulis dan lisan yang disusun dan diajukan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang masalah yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara langsung mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan pihak pelaksana kebijakan yaitu Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dan Ketua Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu, serta masyarakat yang menjadi pelanggan dari TPST Kedungrandu. Sedangkan untuk data sekunder, diartikan sebagai sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, seperti dokumen atau observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kedungrandu. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive* yaitu memilih informan yang dianggap memiliki karakteristik dan pengalaman terkait kebijakan pengelolaan sampah. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Model ini menyatakan bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu berdiri pada tanggal 22 Desember 2018 sebagai upaya penanganan sampah di Kabupaten Banyumas. Adanya protes yang dilakukan warga dengan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA), membuat Kabupaten Banyumas sempat mengalami darurat sampah karena volume sampah yang terus bertambah dan tidak adanya tempat pembuangan yang memadai. Oleh karena itu Kabupaten Banyumas merubah pola yang awalnya tumpuk, angkut, buang menjadi pilah, cacah dan musnahkan, sehingga muncullah program pengelolaan sampah dari sumbernya dan nantinya akan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara mandiri untuk menjalankan kegiatan sosial di lingkungannya dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Melalui KSM ini diharapkan masyarakat dapat mengelola sampah dari sumbernya. Sampah di Kabupaten Banyumas diolah dengan pola pengelolaan sampah 3R yang diterapkan melalui Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) supaya sampah yang sudah diolah dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai jual, karena pada dasarnya sampah awalnya berasal dari sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, sebisa mungkin harus dikembalikan menjadi sesuatu yang bermanfaat.

a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu Kecamatan Patikraja

Pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas No 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada), yang berfokus pada pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sampai 70% hingga tahun 2025 TPST Kedungrandu melaksanakan proses pengangkutan hingga pengolahan sampah melalui tahapan berikut:

- 1) Proses pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga yang berlangganan.
- 2) Dilakukan proses pemilahan sampah secara manual antara sampah residu dan rongsok.
- 3) Melakukan proses cacah pilah sampah dengan menggunakan mesin cacah pilah yang bernama mesin gibrak untuk memisahkan sampah organik dan sampah anorganik secara otomatis.
- 4) Sampah yang sudah terpilah nantinya akan diproses menjadi produk yang bernilai jual.

Untuk mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan maka dibutuhkan komitmen dari pelaksana kebijakan. TPST Kedungrandu sudah berdiri lebih dari 5 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen yang kuat dalam melakukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil dari komitmen yang tinggi dari pihak TPST Kedungrandu, menjadikannya sebagai salah satu TPST terbaik di Asia Tenggara dan menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah dalam acara Smart Green ASEAN Cities (SGAC) Windows Series yang diikuti oleh 13 delegasi dari delapan negara di ASEAN.

Peran dan dukungan masyarakat juga berpengaruh pada kesuksesan implementasi pengelolaan sampah. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan sikap positif dengan keberadaan TPST Kedungrandu, karena adanya TPST ini mampu memberikan solusi terkait dengan masalah sampah di lingkungan mereka. Masyarakat juga merasa terbantu karena mereka tidak harus kebingungan untuk membuang sampah. Selain itu masyarakat juga semakin mendukung pola pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu yang menggunakan sistem daur ulang. Sampah yang awalnya dianggap kotor dan tidak berguna berhasil disulap menjadi barang yang memiliki nilai jual kembali. Hal tersebut semakin memperkuat dukungan masyarakat karena selain berdampak pada kebersihan lingkungan, pola pengelolaan sampah ini akan berdampak pula pada perekonomian daerah. Tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah, keberadaan TPST Kedungrandu juga berdampak pada ekonomi masyarakat karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Setiap kebijakan tidaklah selalu berjalan dengan sempurna, dalam hal ini implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, dalam beberapa hal masih ditemukan kendala yang menjadikan implementasi pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu belum berjalan dengan maksimal. Seringkali terdapat kendala dalam proses implementasi pengelolaan sampah seperti kerusakan pada mesin armada yang menghambat proses pengelolaan sampah. Selain itu, ada masyarakat yang mengatakan bahwa sempat terjadi keterlambatan pengangkutan sampah selama beberapa hari yang menyebabkan sampahnya menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap.

3.2. Pembahasan

a. Implementasi Kebijakan Berdasarkan George C. Edward III

Untuk mengukur keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu, penelitian ini menggunakan teori implementasi yang digagas oleh George C. Edward III. Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, teori ini menggunakan empat indikator diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berikut ini uraian hasil dari penelitian yang dilakukan di TPST Kedungrandu dengan perspektif teori implementasi menurut George C. Edward III.

a) Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi berupa ide atau gagasan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Dalam konteks kebijakan publik, terdapat dua aspek penting dalam komunikasi yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Aspek pertama yaitu bagaimana informasi disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak pelaksana. Kemudian aspek kedua yaitu penerimaan dan pemahaman informasi oleh para pelaksana (Haryadi et al., 2025). Pengertian ini sejalan dengan komunikasi menurut Edward III (dalam Kalvira et al., 2025) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, komunikasi menjadi elemen penting. Adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan masyarakat maka kebijakan akan terealisasi secara maksimal. Komunikasi yang dimaksud berdasarkan teori ini mencakup penyampaian informasi dan pemahaman yang jelas terhadap isi kebijakan, sehingga mencegah terjadinya penafsiran ganda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan program pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu telah dilaksanakan dengan cukup baik, jelas dan konsisten. Pihak pengelola TPST juga mengatakan bahwa kegiatan diawali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi dan edukasi bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas sudah berubah. Namun, untuk melakukan sebuah perubahan bukanlah sesuatu yang mudah, pada awalnya masyarakat akan kaget dan tidak mendukung adanya kebijakan ini, Namun pihak pelaksana kebijakan dan pemerintah terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait kebijakan ini.

Masyarakat juga menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak KSM dan TPST Kedungrandu mudah dipahami dan sesuai, tidak berubah-ubah dari awal. Namun, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa komunikasi atau informasi yang dilakukan antara pihak KSM dengan masyarakat masih kurang baik, karena belum pernah ada petugas dari pihak KSM yang melakukan sosialisasi di lingkungannya dan sering tidak diberi tahu jika terjadi kendala atau keterlambatan dalam proses pengangkutan sampah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalvira et al., 2025) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan di Desa Mulyoagung melibatkan seluruh masyarakat termasuk RT dan RW, informasi ini disampaikan melalui sosialisasi, pelatihan dan edukasi kepada warga. Tidak hanya itu masyarakat juga diberikan akses untuk melihat langsung bagaimana proses pengolahan sampah di TPST. Hal ini membuktikan bahwa aspek komunikasi sangat berperan penting dalam tercapainya implementasi kebijakan.

Dengan demikian efektivitas komunikasi antara pelaksana dan masyarakat menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan di TPST Kedungrandu. Meskipun masih ditemukan kendala dalam penyampaian informasi di lapangan, komunikasi yang jelas, konsisten, dan

mudah dipahami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk pengelola sampah.

b) Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya merupakan aspek kedua yang menjadi faktor penentu tercapainya implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai (Sakir, 2023). Sejalan dengan pernyataan Edward III bahwa kurangnya sumberdaya akan berdampak pada efektivitas implemenetasi kebijakan (Laary, 2022). Aspek ini tidak hanya terbatas pada satu aspek sumber daya, tapi juga berbagai jenis sumber daya yang mendukung satu sama lain (Haryadi et al., 2025). Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sarana prasarana yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian di TPST Kedungrandu telah menunjukkan capaian yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya sumber daya yang memadai. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor pendukung berjalannya implementasi kebijakan yaitu adanya sumberdaya manusia yang memadai. Salah satu tujuan dari KSM yaitu mensejahterakan masyarakat, jadi pihak KSM tidak memberikan syarat secara spesifik untuk menjadi pegawainya, cukup dengan kemauan saja semua orang bisa bekerja di sana. Sebelum melakukan pekerjaannya para pegawai diberi pelatihan dan edukasi semacam *training* terkait apa yang nantinya akan mereka kerjakan, dengan tujuan untuk menekan nilai kecelakaan nihil atau *zero accident*. Hingga saat ini KSM Kedungrandu sudah memiliki 40 tenaga kerja aktif. 40 tenaga kerja tersebut terbagi menjadi beberapa bidang yaitu bidang pengangkutan, bidang pemilahan dan bidang pengolahan.

2) Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal ini sumber anggaran yang didapat oleh pihak KSM Kedungrandu diperoleh secara mandiri melalui hasil penjualan dari produk olahan sampah dan tarikan yang dilakukan kepada masyarakat yang berlangganan pengangkutan sampah di TPST Kedungrandu.

3) Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pengelolaan sampah TPST Kedungrandu juga didukung oleh beberapa mesin yang sudah canggih seperti mesin gibrick dan mesin *hot extruder*. Mesin gibrick merupakan mesin cacah pilah yang berfungsi untuk memisahkan sampah anorganik dan sampah organik secara otomatis, sedangkan mesin *hot extruder* merupakan mesin yang berfungsi untuk melelehkan plastik yang nantinya akan dicetak dan dibuat sebagai produk olahan yang memiliki nilai jual, seperti paving block plastik, genteng plastik, dan bahan bangunan lainnya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Nurcahyanto (2024) yang menyatakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi secara umum sudah berjalan baik. Namun, kualitas sumber daya manusia yang ada baik dari pemerintah maupun masyarakat belum memadai sehingga masih menjadi hambatan bagi implementasi pengelolaan sampah.

Dengan demikian ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efisien. Dalam penelitian ini, aspek sumber daya yang ada di TPST Kedungrandu sudah memadai. Dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung, serta adanya sumberdaya manusia yang kompeten, membuat pengolahan sampah di TPST Kedungrandu berjalan dengan baik, hal ini

dibuktikan dengan keberhasilannya mengelola sampah hingga 15 ton perharinya.

c) Aspek Disposisi Pelaksana

Untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan diimplementasikan dengan baik, disposisi atau sikap pelaksana menjadi elemen penting didalamnya. Kebijakan yang efektif tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan pemahaman para pelaksana saja, tetapi juga keterampilan, komitmen, dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan secara optimal (Haryadi et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III (Laary, 2022) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif tidak hanya dilihat dari isi kebijakan, tetapi juga kesiapan dan sikap pelaksana.

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan menunjukkan sikap dan respon yang baik dari para pelaksana kebijakan dan komitmen yang kuat untuk mengurangi sampah di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya TPST Kedungrandu yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Adanya pelatihan dan edukasi yang dilakukan oleh pihak KSM kepada para pegawainya sebelum memulai pekerjaannya menunjukkan bahwa komitmen KSM sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu. Masyarakat yang menggunakan jasa layanan pengangkutan sampah di TPST Kedungrandu mengatakan bahwa sikap para pegawai ramah. Namun, dalam proses pengangkutan sampah masih belum konsisten, seringkali ada keterlambatan dari pihak KSM. Jadwal pengangkutan yang seharusnya dua kali dalam seminggu biasanya hanya diangkut satu kali, dan bahkan sempat dibiarkan selama berminggu-minggu tidak diangkut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalvira et al., 2025) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu telah menunjukkan hasil yang baik. Dalam penelitian ini aspek disposisi terlihat pada sikap dan partisipasi masyarakat yang ikut memilah sampahnya. Selain itu pemerintah desa juga melakukan pelatihan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah menunjukkan adanya komitmen dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini sama – sama menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan, penelitian yang dilakukan oleh (Kalvira et al., 2025) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu telah menunjukkan hasil yang baik, sedangkan untuk hasil penelitian di TPST Kedungrandu masih ditemukan hambatan atau kendala dalam proses pengangkutan sampah yang belum konsisten dan seringkali mengalami keterlambatan.

d) Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang ditetapkan untuk mengkoordinasikan pekerjaan demi kepentingan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan (Sakir, 2023). Sistem birokrasi yang berfungsi dengan baik memungkinkan jalannya pelaksanaan kebijakan yang lebih terorganisir, efisien dan terukur (Haryadi et al., 2025). Hal tersebut sejalan dengan struktur birokrasi menurut Edward III (Laary, 2022) yang menyatakan bahwa mekanisme atau *Standar Operating Procedure* (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian tugas merupakan faktor terakhir yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian di TPST Kedungrandu menyatakan struktur birokrasi yang ada sudah jelas, struktur organisasi yang ada terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penasehat, dan koordinator bidang, mulai dari bidang pengangkutan, bidang pemilahan, bidang pencacahan, bidang

pemberitaan dan termasuk penjaga keamanan, dengan pemegang kebijakan ada di ketua. Dalam proses pembagian tugas KSM Kedungrandu membagi beberapa bidang dalam proses implementasi pengelolaan sampah. Bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Bidang pengangkutan, dalam hal ini petugas yang bertugas dalam bidang pengangkutan difokuskan sendiri dan terdiri dari beberapa petugas. Petugas ini nantinya akan mengangkut sampah-sampah masyarakat yang menggunakan jasanya.
- 2) Bidang pemilahan, setelah sampahnya diangkut dan dibawa ke TPST, maka sampah tersebut akan dipisahkan secara manual antara sampah residu dan rongsok sebelum dimasukan ke mesin cacah pilah.
- 3) Bidang pengolahan, kemudian sampah yang sudah dipilah akan diolah di bidang pengolahan supaya menghasilkan sebuah produk.

Sebelum menjalankan masing-masing tanggung jawab yang telah dibagikan ini tentunya pihak KSM Kedungrandu mempunyai *Standart Operating Procedure* (SOP) atau panduan dalam proses implementasi kebijakan. Pihak KSM memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) sebelum beraktivitas yaitu dengan memahami tentang jenis pekerjaannya, dan tentu menggunakan alur *zero accident*. Untuk membekali hal tersebut tentu KSM akan membenahi terlebih dahulu tentang aktivitasnya, dengan melalui *training* atau pelatihan sebelum beraktivitas. Selain itu Pihak KSM juga memiliki alur atau panduan dalam proses pengolahan sampah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga yang berlangganan.
- 2) Dilakukan proses pemilahan sampah secara manual antara sampah residu dan rongsok. Sampah residu yang sudah terpisah nantinya akan dibakar menggunakan mesin *pyrolysis* dan akan menjadi abu yang nantinya bisa dimanfaatkan menjadi batako.
- 3) Melakukan proses cacah pilah sampah dengan menggunakan mesin cacah pilah yang bernama mesin gibri yang berfungsi memisahkan sampah organik dan sampah anorganik secara otomatis.
- 4) Sampah organik yang sudah terpilah kemudian akan diolah menjadi pakan magot dan pupuk kompos.
- 5) Sampah plastik dihancurkan menggunakan mesin *hot extruder* yang nantinya akan menghasilkan plastik cair atau biji plastik. Kemudian plastik tersebut dicetak dan dijadikan sebagai barang yang bernilai jual seperti paving block plastik, genteng plastik, papan, kaso, dan bahan bangunan lain.

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menyatakan proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yaitu mengurangi sampah di Kabupaten Banyumas karena adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dan pembagian tugas yang jelas.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Bengkulu Selatan oleh (Hastuti et al., 2021) menunjukkan bahwa para pelaksana yang terlibat telah memahami tugas dan tanggung jawabnya. Adanya komitmen dan tingkat kedipsilinan yang tinggi menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan di Bengkulu Selatan sudah cukup baik. Namun, implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fakta bahwa masih terdapat pelaksana yang belum memenuhi *Standart Operating Prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dan struktur organisasi yang jelas menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu. Adanya pembagian tugas yang terorganisir di setiap

bidangnya menjadikan pengelolaan sampah berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Kesimpulan

Implementasi pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu dilakukan dengan pola pengelolaan sampah 3R. Sampah-sampah yang ada di TPST Kedungrandu dipilah dan diolah menjadi barang yang mempunyai nilai jual kembali. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kedungrandu sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek sebagai berikut.

- 1) Komunikasi yang terjalin antara pemerintah, KSM dan masyarakat sudah berjalan baik melalui sosialisasi dan edukasi. Informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengelolaan sampah juga tersampaikan dengan jelas dan konsisten. Namun masih ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan terkait keterlambatan pemberitahuan ketika terjadi kendala dalam proses pengangkutan.
- 2) Sumber daya, dalam aspek ini sumber daya manusia yang ada sudah cukup memadai dengan 40 tenaga kerja yang sudah terlatih. Sarana dan prasarana yang ada juga sudah memadai, dengan adanya mesin canggih seperti mesin gibrak dan *hot extruder* yang mendukung proses pengelolaan sampah lebih optimal.
- 3) Disposisi pelaksana, pada aspek ini pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di TPST Kedungrandu memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan beroperasinya TPST yang sudah lebih dari 5 tahun. Namun, masih terdapat kendala dalam konsistensi waktu pengangkutan sampah karena adanya faktor teknis, seperti kerusakan alat atau armada.
- 4) Struktur Birokrasi yang ada di TPST Kedungrandu sudah jelas, dengan pembagian tugas dan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang jelas. Setiap bidang yang ada mulai dari pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan memiliki alur kerja tersendiri yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala pada aspek komunikasi dan disposisi. Namun secara keseluruhan implementasi kebijakan di TPST Kedungrandu sudah cukup baik, karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti mesin pemilah sampah otomatis. Dengan demikian, TPST Kedungrandu dapat dijadikan contoh keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas karena telah sukses mengurangi volume sampah yang ada. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan TPST Kedungrandu dapat terus berkembang dan menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan di daerah lain. Selain itu, agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, TPST Kedungrandu harus terus melakukan evaluasi dan inovasi yang mendukung tercapainya implementasi kebijakan yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- BRIN, H. (2024). *Kabupaten Banyumas Sulap Sampah Berubah Uang*. Badan Riset Dan Inovasi Nasional. <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/kabupaten-banyumas-sulap-sampah-berubah-uang>
- Kurniawan, D. A. K., & Santoso, A. Z. S. (2021). *Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan*

- Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>
- Fadlurrahman, I. (2024). *Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 282,48 Juta Jiwa pada Juni 2024*.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/28b276946b7eb00/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-28248-juta-jiwa-pada-juni-2024#:~:text=Dukcapil:Jumlah Penduduk Indonesia 282%2C48 Juta Jiwa pada Juni 2024,-Demografi&text=Melansir data kependudukan>
- Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 12–18.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3577>
- Ghaisal ramadhan, Herbasuki nurcahyanto, T. Y. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah Di Kota Bekasi*. 1–23.
- Haryadi, A. D., Ristala, H., Jenderal, U., Yani, A., Sampah, P., & Hidup, L. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Timbunan Sampah Dengan Prinsip 3R Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi*. 02(01).
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Kalvira, F., Wulndry, R. M. C., & Putra, R. E. N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang: Implementation of Organic Waste Management Policy in Mulyoa gung Village Dau Sub-District Malang District. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 2(1), 194–202.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. September.
- Laary, Y. (2022). *Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*. VIII(120), 60–68.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus Model dan Pendekatan Implementasi kebijakan*. 1, 69–73.
- Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). *Jane - Jurnal Administrasi Negara*.
<https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28690>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman, Journal of Management, Accounting and Administration Vol. 1, No.2 : 2024, hlm 81. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
<https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- RI, B. (2023). *Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik Di Indonesia*.
<https://jabar.bpk.go.id/penyelenggaraan-pengelolaan-sampah-spesifik-di-indonesia/>
- Sakir, A. R. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon*. 3, 1–12.
- Sari, nisa mutia. (2024). *Banyumas Disebut sebagai Kabupaten dengan Pengolahan Sampah Terbaik di Asia Tenggara, Begini Faktanya*.

- Sufi, I. F., Studi, P., & Ilmu, M. (2022). *Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di kecamatan dumai timur kota dumai*.
- Utami, S. N. (2024). Implementasi Salinmas Sebagai Upaya Penanganan Sampah Organik (Studi Kasus: Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 634–645.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>